

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2025



PT. BPR Dana Mandiri
Jl. Asia No. 184-G Medan

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR Dana Mandiri
Alamat	Jln. Asia No. 184 - G Medan
Nomor Telepon	(061) 7880688

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Dana Mandiri pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Dana Mandiri memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Dana Mandiri dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Medan. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Dana Mandiri didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Dana Mandiri.

BPR Dana Mandiri telah beroperasi lebih dari 15 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Dana Mandiri selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Dana Mandiri terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Wiemin
	Jabatan	Direktur Utama Yang Membawahi Kepatuhan
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama YMFK adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Menjalankan pengelolaan Bank secara profesional dan konservatif sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian, Anggaran Dasar Perusahaan, Regulasi/ Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Menjalankan kewenangan Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, yaitu Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili kepentingan Perseroan</p> <p>c. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir dan/ atau "berhalangan" oleh sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi yang lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili kepentingan Perseroan.</p> <p>d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan asset perusahaan serta bertanggung jawab terhadap semua transaksi operasional termasuk laporan yang bersifat intern maupun ekstern.</p> <p>e. Dalam hal pemenuhan tata kelola, salah satu Direksi harus membawahi fungsi kepatuhan, maka Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama dengan komitmen Direktur Utama tidak termasuk dalam Komite Kredit. Dan akan ditangani oleh anggota Direksi lainnya</p> <p>f. Merealisasikan pencapaian target/sasaran keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan usaha dan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang "baik dan sehat" pada setiap jenjang organisasi BPR</p> <p>g. Membentuk Pejabat Eksekutif Audit Interen , Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko , Pejabat Eksekutif Kepatuhan</p> <p>h. Mendukung terselenggaranya Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kebutuhan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan/ unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit interen, dan independen terhadap unit kerja lain</p>		
2.	Nama	Desmanto
	Jabatan	Direktur
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Menjalankan pengelolaan Bank secara profesional & konservatif sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian, Anggaran Dasar Perusahaan, Regulasi/ Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Menjalankan kewenangan Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, yaitu Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya</p>		

- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili kepentingan Perseroan
- c. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir dan/ atau "berhalangan" oleh sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi yang lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili kepentingan Perseroan
 - d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan asset perusahaan serta bertanggung jawab sebagai pejabat dalam komite kredit
 - e. Dalam hal pemenuhan tata kelola, Sdr. Desmanto selaku Direksi Membawahi Marketing kredit dan Customer Service
 - f. Merealisasikan pencapaian target/sasaran keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan usaha dan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang "baik dan sehat" pada setiap jenjang organisasi BPR
 - g. Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yg diterima dari audit interen, audit eksteren, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya
 - h. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk action plan dengan tenggat waktu (deadline) yg wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama segera dilaporkan kepada seluruh stakeholders terkait
 - i. Menyampaikan data & informasi yg akurat, relevan & tepat waktu kpd Dewan Komisaris dlm rangka terselenggaranya "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR
 - j. Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas setiap kerugian perseroan dan pihak lain.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. BPR Dana Mandiri berusaha memaksimalkan Penerapan Tata Kelola secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per tahun) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Dana Mandiri .
- d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti
- f. Temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Minani Rasad
	Jabatan	Komisaris Utama
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris PT BPR DANA MANDIRI berkewajiban untuk :

- a) Menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian, Anggaran Dasar BPR, Regulasi/Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
- c) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat.
 - hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
- e) Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
- f) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR.
 - penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.
- g) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:
 - temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan
 - hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain.
- h) Dewan Komisaris wajib:
 - menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.
 - mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.
- i) Dewan Komisaris wajib:
 - menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.
 - mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.
- j) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi .
- k) Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan atas:
 - pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

2.

Nama

Anton

Jabatan

Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank
- c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per tahunan) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Dana Mandiri.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2025.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Nihil.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	WIEMIN
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

2.	Nama	DESMANTO
	Persentase Kepemilikan (%)	2,50

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	MINANI RASAD
	Persentase Kepemilikan (%)	22,50
2.	Nama	ANTON
	Persentase Kepemilikan (%)	5,00

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Wiemin
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Desmanto
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Minani Rasad
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Anton
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
--	---	------

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak terdapat kepemilikan saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham pada kelompok usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Wiemin
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Desmanto
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Minani Rasad
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Anton
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak terdapat kepemilikan saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Wiemin
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Desmanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Minani Rasad
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Anton
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	WILLIAM TAYLOR
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di	Tidak Ada

	BPR	
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada
2.	Nama	EDDY RIJAB
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada
3.	Nama	MARHAYANIE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Wiemin
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Desmanto
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan	Tidak ada

Pemegang Saham Lain di BPR	
-----------------------------------	--

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Minani Rasad
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Anton
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	William Taylor
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada
2.	Nama	Eddy Rijab
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada
3.	Nama	Marhayanie
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak Ada

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak Ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak Ada

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp672.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp360.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp56.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp30.000.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp26.600.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp13.600.000

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp14.400.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp14.400.000

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Remunerasi telah sesuai dengan hasil keputusan RUPS. Fasilitas lainnya berupa BPJS ketenagakerjaan yang ditanggung oleh perusahaan. Fasilitas transport Kedua Direksi mendapatkan fasilitas mobil dinas selama masa menjabat, selain itu biaya BBM ditanggung oleh BPR .

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	2,22 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,00 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,14 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,75 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	3,15 : 1
-------------	----------

Penentuan Remunerasi Direksi dan Komisaris berdasarkan kebijakan remunerasi Direksi dan komisaris serta hasil keputusan RUPS, sedangkan remunerasi karyawan berdasarkan standar skala gaji yang telah dibuat oleh Direksi

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	03 Maret 2025
----	---------------	---------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

1. Berdasarkan hasil kinerja triwulan I bulan Februari 2025 tingkat NPL masih tinggi dengan nilai rasio 9.66% sehingga menjadi perhatian khusus kepada Direksi untuk dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah baik secara pendekatan kepada debitur maupun penyelesaian melalui lelang jaminan.
2. Direktur juga fokus dalam penyaluran kredit yang baru dimana kondisi pasar yang kurang baik dengan jalan menyisir sektor – sektor yang potensial untuk meningkatkan Outstanding kredit.
3. Direksi dan karyawan mempersiapkan data untuk persiapan pemeriksaan OJK periode tahun 2025 agar pemeriksaan berjalan lancar.
4. Himbauan kepada Direksi agar menjaga dan menjalankan kepatuhan baik dari segi kewajiban pelaporan kepada regulasi maupun perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasional BPR.

5. AYDA yang telah diakui pada Februari 2025 agar diupayakan penjualan AYDA tersebut sebelum memasuki jatuh tempo 1 tahun yang akan mempengaruhi modal inti BPR.
6. Direksi agar tetap dapat memantau kinerja karyawan termasuk kinerja harian, disiplin, cuti agar operasional BPR tetap berjalan lancar .

2.	Tanggal Rapat	16 Juni 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Tingkat NPL Mei 2025 sebesar 8.32%, masih tergolong tinggi dipengaruhi oleh bertambahnya kredit yang bermasalah serta pertumbuhan outstanding kredit yang melambat, maka Direksi agar lebih aktif dalam penyaluran kredit terutama wilayah sekitar yang menjalankan usaha.
2. Dalam Rencana bisnis akan diadakan penambahan karyawan pada divisi marketing untuk dapat menunjang penyaluran kredit ke berbagai wilayah, selain itu juga penawaran kepada masyarakat untuk penempatan dana pada BPR. Karena kondisi LDR BPR sudah diatas 90% sehingga harus diseimbangi juga dengan penambahan DPK dari masyarakat.
3. Direksi dan karyawan agar menindaklanjuti temuan OJK sesuai komitmen yang telah disepakati oleh BPR dan OJK, dan diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.
4. Untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pengetahuan atas ketentuan – ketentuan terbaru serta pelaporan baru yang akan diberlakukan, maka Direksi dan karyawan dapat memanfaatkan pelatihan dari pihak ekstern yang dapat membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan. Selain itu akan diadakan pelatihan outdoor kepada seluruh karyawan yang rencana akan berkolaborasi dengan beberapa BPR.
5. Direksi dan karyawan juga berperan aktif dalam kegiatan edukasi/ literasi dalam pengenalan ruang lingkup BPR di wilayah sekitar, serta kegiatan inklusi dalam penawaran produk BPR Dana Mandiri kepada masyarakat, peran serta Account Officer sangat diharapkan dalam kegiatan ini untuk dapat menambah kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada BPR Dana Mandiri untuk dapat bekerjasama.
6. Dalam kegiatan aksi keuangan berkelanjutan, BPR masih fokus dengan kegiatan yang bersifat umum diantaranya, penghematan listrik (ruangan yang kosong dimatikan listrik dan AC serta komputer), paperless (laporan hanya menggunakan media komputer, online termasuk laporan kepada regulasi yang sudah online semuanya), pembatasan penggunaan wadah plastik di lingkungan kantor BPR Dana Mandiri.
7. Peran serta Direksi dan Komisaris serta seluruh karyawan dalam menjaga prinsip kehati-hatian yang bertujuan pada pengendalian manajemen risiko kredit, kepatuhan, operasional dan likuiditas. Agar dapat memperkecil risiko yang kemungkinan akan terjadi.

3.	Tanggal Rapat	15 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. BPR telah melakukan update atas Pedoman & Tata Tertib Direksi dan Komisaris sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2024 tentang Tata

Kelola Bank dan anggaran dasar BPR Dana Mandiri.

2. Direksi akan mempersiapkan bahan rapat untuk pembahasan RBB tahun 2026 yang mungkin akan diadakan pada Oktober 2025.
3. Direksi agar menindaklanjuti temuan Audit Internal maupun hasil pemeriksaan OJK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan dateline yang telah disepakati.
4. Telah dilakukan pemasangan spanduk untuk promosi produk BPR yang sekalian menampilkan produk dan suku bunga yang menarik bagi masyarakat.
5. Kebijakan perlindungan konsumen yang belum sesuai ketentuan agar dilakukan perbaikan serta penerapan dalam kegiatan operasional BPR dalam menjalankan perlindungan konsumen.
6. Pembekalan untuk 2 orang account officer yang baru, agar dapat dibimbing dan diarahkan pengetahuan bidang marketing.
7. Direksi juga agar fokus pada rasio LDR yang hingga Agustus 2025 mencapai 102.56% dimana dana pihak ketiga sudah hampir mendekati dengan total kredit yang diberikan, dan cadangan dana pada Bank Lain juga sudah menurun jumlahnya. Fokus pada penghimpunan dana dan menyeimbangi dengan penyaluran dana.
8. Kondisi NPL prd Agustus 2025 mencapai 8.33% cukup tinggi dari rasio SEHAT. Direksi senantiasa melakukan monitoring pembayaran debitur dan penyelesaian kredit yang bermasalah dengan cara pendekatan kepada debitur dan membantu memberi solusi penyelesaian.

4.	Tanggal Rapat	15 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Tingkat NPL November 2025 sebesar 8%, masih tergolong tinggi dipengaruhi oleh bertambahnya kredit yang bermasalah serta pertumbuhan outstanding kredit yang melambat, maka Direksi agar lebih aktif dalam penyaluran kredit terutama wilayah sekitar yang menjalankan usaha. Selain itu Direksi agar fokus dalam penyelesaian kredit yang bermasalah dengan jalan persuasif maupun lelang.
2. OS kredit posisi November 2025 sebesar 34.1M dinilai masih jauh dari target RBB yaitu sebesar 37.6 M diharapkan kepada Direksi untuk memaksimalkan kinerja terutama pencapaian target kredit.
3. Pembahasan persiapan RUPS yang rencana akan diadakan pada Januari 2025 yang diantaranya akan membahas :
 - Pembahasan Kinerja dan pertanggungjawaban Direksi dalam laporan keuangan tahunan posisi 31 Desember 2025
 - Pembahasan Rencana Kerja Tahun 2026 dan strategi bisnis
 - Perubahan anggaran dasar atas usulan SK remunerasi dan nominasi yang dibuat Komisaris untuk dibawa ke RUPS
 - Perubahan anggaran dasar atas masa jabatan pengurus yang sebelumnya 5 tahun menjadi 3 tahun.
 - Perpanjangan masa jabatan pengurus yang jatuh tempo pada Februari 2026
1. Untuk mendukung peningkatan bisnis maka diharapkan kepada Direksi agar melakukan penambahan SDM marketing di tahun 2026
2. Direksi agar fokus pada penyelesaian AYDA yang telah dilakukan pada Februari 2025 dan akan jatuh tempo pada Februari 2026 yang akan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti.
3. Direksi sudah dapat menilai kinerja karyawan dengan form P2K yang telah diisi oleh

karyawan dan dinilai oleh kabag terkait serta diputuskan oleh Direksi.

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 4 (empat) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2025. Yang dihadiri oleh Komisaris Utama dan anggota komisaris

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Minani Rasad
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anton
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama periode tahun 2024 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Dana Mandiri.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang dialami oleh BPR Dana Mandiri

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Nihil.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR DANA MANDIRI untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Medan, 10 April 2026

PT. BPR DANA MANDIRI

Disiapkan Oleh :

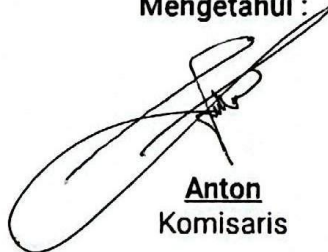

Desmanto
Direktur



Mengetahui :


Minani Rasad
Komisaris Utama

Mengetahui :


Anton
Komisaris